

Menyoal Akuntabilitas Gerakan Laki-Laki Pro-Feminis terhadap Gerakan Perempuan

Oleh : Nur Hasyim, M.A.¹

A. Pengantar

Isu akuntabilitas gerakan laki-laki pro-feminis dan program pelibatan laki-laki dalam upaya pencapaian keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu isu panas dalam sejarah gerakan laki-laki pro-feminis di dunia. Isu akuntabilitas menyertai ketidakbulatan penerimaan gerakan feminis terhadap kehadiran laki-laki yang sebenarnya sebagian besar mereka asuh sendiri, baik secara langsung maupun tidak, dalam gerakan untuk melawan ketidakadilan yang dialami perempuan.

Jika dalam hal kehadiran laki-laki dalam gerakan perempuan, feminist memiliki pandangan yang berbeda, tidak demikian dalam hal pandangan mereka tentang akuntabilitas gerakan laki-laki pro-feminis terhadap gerakan perempuan. Akuntabilitas gerakan laki-laki yang memiliki kesadaran feminis tersebut terhadap gerakan perempuan dipandang sebagai keniscayaan dari pendakuan laki-laki akan visi keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

B. Mengapa akuntabilitas gerakan laki-laki pro-feminis dan program pelibatan laki-laki terhadap gerakan perempuan penting?

Mengapa akuntabilitas gerakan laki-laki pro-feminis dan program pelibatan laki-laki ini sebuah keniscayaan? Laki-laki adalah kelompok penguasa dalam rezim gender (*gender regime*) di berbagai institusi sosial di masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena tatanan gender (*gender order*) yang melingkupinya memberikan privelese dan kuasa kepada laki-laki, oleh sebab itu laki-laki merupakan kelompok sosial yang dominan atas perempuan dalam hirarki jenis kelamin. Gerakan laki-laki pro-feminis dan program pelibatan laki-laki dalam pencapaian keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah gerakan melucuti privelese dan kuasa laki-laki untuk selanjutnya membangun perlakuan yang adil (tanpa pemberian privelese pada salah satu kelompok) terhadap laki-laki dan perempuan serta redistribusi kuasa yang setara.

¹ Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo Semarang, salah satu pendiri Aliansi Laki-Laki Baru sebuah jaringan laki-laki pro-feminis di Indonesia.

Artinya gerakan laki-laki pro-feminis sejatinya adalah perlawanan terhadap diri laki-laki sendiri dan kelompoknya. Lebih lanjut, akuntabilitas gerakan ini dan seluruh inisiatif pelibatan laki-laki dalam pencapaian keadilan gender terhadap gerakan perempuan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa gerakan laki-laki pro-feminis benar-benar untuk keadilan yang hakiki dan bukan tipu-muslihat laki-laki untuk kembali menancapkan cengkraman kekuasaannya dalam ruang-ruang politik yang sudah susah payah direbut dan dibangun oleh perempuan.

Rus Ervin Funk (1993), membeberkan deretan argumentasi keniscayaan akuntabilitas gerakan laki-laki pro-feminis terhadap gerakan feminis atau gerakan perempuan; *pertama*, keadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan adalah menyangkut hidup-mati perempuan. Gerakan laki-laki pro-feminis atau program pelibatan laki-laki adalah gerakan untuk atau atas nama perempuan (karena tidak selalu ada proses konsultasi dengan perempuan sebagai korban) untuk mengembalikan martabat perempuan sebagai manusia. Jika akuntabilitas itu merupakan konsekuensi etis bagi mereka yang secara jelas mendapat mandat atau menerima pendelegasian dari kelompok masyarakat korban maka lebih-lebih bagi mereka yang mengatasnamakan atau mengklaim mewakili kelompok korban dalam masyarakat. Akuntabilitas terhadap gerakan perempuan dan perempuan secara umum dengan demikian merupakan kewajiban etis gerakan laki-laki pro-feminis, lebih-lebih ketika gerakan laki-laki pro-feminis tidak selalu dapat berkonsultasi dengan perempuan untuk mendapatkan mandat dalam memperjuangkan kepentingan mereka yang menjadi korban ketidakadilan dan kekerasan.

Kedua, hidup dengan adil dan tanpa kekerasan bagi perempuan adalah hal yang harus diperjuangkan sedangkan bagi laki-laki dalam konstruksi budaya patriarkhis memperjuangkan keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah pilihan. Karena sebagai pilihan, laki-laki dapat saja berhenti untuk memperjuangkan keadilan gender, memilih diam atau bahkan sebaliknya melakukan tindakan yang mendukung ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan.

Ketiga, ketika memperjuangkan keadilan gender atau menjadi pro-feminis merupakan pilihan bagi laki-laki, maka perempuan tidak dapat mengukur secara pasti atau memastikan komitmen laki-laki terhadap keadilan gender dan anti kekerasan terhadap perempuan kecuali laki-laki itu sendiri. Lebih-lebih kenyataan menyebutkan bahwa ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh laki-laki dengan berbagai latar belakang; mulai dari laki-laki biasa, pejabat publik, tokoh agama, tokoh masyarakat, politisi, pendidik (ustadz, guru maupun dosen

dengan gelar akademik tertinggi) bahkan laki-laki yang dikenal pro-feminist. Karenanya komitmen terhadap keadilan gender dan anti kekerasan terhadap perempuan bagi laki-laki merupakan komitmen hidup sehingga akuntabilitas laki-laki pro-feminis terhadap gerakan perempuan dan perempuan secara umum berlaku hingga di penghujung hayat laki-laki. Hal ini karena dalam sistem sosial yang masih memihak kepada laki-laki tidak ada jaminan apapun bagi laki-laki untuk tidak melakukan ketidakadilan gender atau kekerasan terhadap perempuan, seperti thesis Susan Brownmiller, sebagaimana dikutip Kilmartin dan Allison (2007) bahwa semua laki-laki berpotensi menjadi pelaku kekerasan (pemerksa) terhadap perempuan.

C. Apa itu akuntabilitas gerakan laki-laki pro-feminis atau program pelibatan laki-laki?

Lalu, apa yang dimaksud dengan akuntabilitas gerakan laki-laki pro-feminis dan program pelibatan laki-laki terhadap gerakan perempuan. Funk (1993) mendefinisikan akuntabilitas sebagai responsive terhadap kepemimpinan feminis. Responsive disini diartikan sebagai (a) mendengarkan aspirasi dan kepentingan perempuan dan gerakan feminis (b) bertanggungjawab terhadap pilihan dan tindakan (c) kemauan untuk mengakui atas kesalahan yang dibuat, termasuk kejujuran bahwa laki-laki, dalam bentuk berbeda-beda, memang mendapatkan privilese dan kekuasaan dalam masyarakat, pengakuan bahwa laki-laki adalah sebagian besar pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Dengan pengertian sebagaimana diuraikan. akuntabilitas gerakan pro-feminis atau program pelibatan laki-laki mensyaratkan integrasi gerakan laki-laki pro-feminis dalam gerakan feminis atau gerakan perempuan secara umum, program-program pelibatan laki-laki diselenggarakan secara paralel dengan pemberdayaan perempuan dan gerakan pro-feminis dan program pelibatan laki-laki menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai partisipan program atau konstituen gerakan.

D. Siapa saja yang harus akuntabel?

Dalam konteks gerakan laki-laki pro-feminis dan program pelibatan laki-laki, semua laki-laki dan siapapun yang terlibat dalam upaya pencapaian keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan harus akuntabel terhadap gerakan perempuan. Namun demikian karena laki-laki memiliki keterlibatan yang berbeda-beda, maka untuk memperjelas dapat digolongkan

dalam tiga kelompok; (1) Laki-Laki sebagai aktifis gerakan pro-feminis atau sebagai pelaksana program pelibatan laki-laki (2) Laki-laki sebagai partisipan program atau sebagai konstituen gerakan (3) laki-laki sebagai pelaku kekerasan.

Bentuk akuntabilitas dari ketiga kelompok tersebut berbeda-beda sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut; *pertama*, laki-laki sebagai aktifis gerakan pro-feminis atau pelaksana program pelibatan laki-laki memiliki beberapa bentuk akuntabilitas seperti (a) Menjadikan sikap dan perilakunya akuntabel terhadap pasangan dan perempuan dalam hidupnya (saudara, anak, ibu, teman dan seterusnya, dengan kata lain, keadilan gender dan anti kekerasan terhadap perempuan tidak berhenti di depan pintu rumah tapi masuk dalam kehidupan laki-laki yang paling personal dan privat (b) Pengakuan dan kesadaran akan privilese dan kekuasaan yang dinikmati laki-laki dan kesadaran bahwa privilese dan kekuasaan tersebut mengakibatkan penderitaan perempuan. (c) Membangun komunikasi yang kuat dengan gerakan feminis atau gerakan perempuan. (d) Mengkonsultasikan setiap inisiatif yang dikembangkan/dibangun kepada gerakan perempuan. (e) Mengundang perempuan atau feminis untuk memonitor dan mengevaluasi inisiatif yang dikembangkan. (f) Mendukung leadership perempuan dalam gerakan untuk keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Kedua, laki-laki sebagai partisipan program atau konstituen gerakan memiliki bentuk akuntabilitas sebagai berikut; (a) Menjadikan sikap dan perilakunya akuntabel terhadap pasangan dan perempuan yang memiliki hubungan dekat dengannya (pasangan, anak, saudara, ibu, teman dsb) (b). Pengakuan dan kesadaran terhadap privilese dan kuasa yang dimiliki laki-laki dan kesadaran bahwa privilese dan kekuasaan itu mengakibatkan penderitaan perempuan. (c) Terbuka terhadap penilaian pasangan/perempuan terhadap sikap dan perilaku terkait dengan gender dan kekerasan terhadap perempuan. (d) Mendukung perempuan untuk berkembang sesuai dengan potensi penuhnya sebagai manusia.

Ketiga, laki-laki sebagai pelaku kekerasan memiliki bentuk akuntabilitas sebagai berikut (a) Mengakui bahwa tidak ada alasan yang membenarkan kekerasan (b) Bertanggungjawab seratus persen atas kekerasan yang dilakukan (c) berkomitmen untuk perubahan perilaku sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas kekerasan yang dilakukan. (d) Pengakuan dan kesadaran terhadap privilese dan kekuasaan yang dinikmati laki-laki dan kesadaran bahwa privilese dan kekuasaan tersebut mengakibatkan penderitaan perempuan (e) Menjadikan pasangan/perempuan

sebagai penilai atas proses perubahan perilaku. (f) Mendukung proses pemulihan dan pemberdayaan perempuan korban.

E. Kepada siapa gerakan laki-laki pro-feminis atau program pelibatan laki-laki harus akuntabel?

Gerakan laki-laki pro-feminis dan program pelibatan laki-laki harus akuntabel kepada setiap perempuan seperti (a) perempuan-perempuan yang memiliki hubungan dekat dalam hidup aktivis, partisipan, maupun laki-laki pelaku kekerasan yang terlibat dalam gerakan maupun program pelibatan laki-laki seperti pasangan, anak, saudara, ibu, teman dan seterusnya. (b) Perempuan yang terlibat sebagai partisipan program atau konstituen gerakan laki-laki pro-feminis. (c) Perempuan maupun kelompok perempuan yang bekerja dengan perempuan korban kekerasan.

F. Beberapa model struktur gerakan program yang mendukung akuntabilitas gerakan laki-laki pro-feminis dan program pelibatan laki-laki?

Akuntabilitas gerakan laki-laki pro-feminis dan program pelibatan laki-laki dalam pencapaian keadilan gender dan penghapusan kekerasan dalam prakteknya tidak semudah rumusan konsepnya dan tidak ada satu model mekanisme akuntabilitas yang dianggap mujarab untuk semua gerakan dan program karenanya berbagai kelompok jaringan laki-laki pro-feminis memiliki model dan bentuk mekanisme akuntabilitas yang berbeda-beda. Seperti studi yang dilakukan Bojin (2013) bahwa ada beberapa model yang diterapkan laki-laki pro-feminis dalam menjaga akuntabilitas mereka terhadap gerakan feminis di antaranya (a) melakukan konsultasi dengan gerakan feminis dan gerakan perempuan dalam keseluruhan inisiatif bekerja dengan laki-laki untuk keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. (b) Menjadikan aktifis perempuan sebagai salah satu anggota dewan pengawas/pengurus (board). (c) Melibatkan laki-laki dan perempuan sebagai staf pelaksana program.

Untuk konteks Indonesia, Aliansi Laki-Laki Baru menerapkan model akuntabilitas terhadap gerakan perempuan dengan beberapa cara di antaranya (a) membuat keanggotaan aliansi bersifat inklusif (laki-laki, perempuan, dan identitas lainnya dapat menjadi anggota) (b) Membentuk konsultatif group yang terdiri dari lima organisasi perempuan yang mendukung berdirinya Aliansi Laki-Laki Baru. (c) dalam menjalankan inisiatif, ALB bekerjasama dengan

organisasi perempuan terutama lima organisasi perempuan yang menjadi pendukung berdirinya ALB (Hasyim, 2014)

Dengan mengacu beberapa hal tersebut setidaknya ada beberapa model mekanisme akuntabilitas gerakan laki-laki pro-feminis atau program pelibatan laki-laki untuk keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di antaranya;

A. Untuk organisasi gerakan laki-laki pro-feminis

- Menjadikan feminis/aktifis perempuan sebagai anggota tim pengarah/board.
- Melibatkan staf perempuan dan laki-laki
- Melibatkan feminis/aktifis perempuan dalam monitoring dan evaluasi
- Menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai penerima manfaat

B. Untuk Program Pelibatan Laki-laki

- Menjadikan feminis/aktifis perempuan sebagai anggota tim pengarah/board
- Melibatkan staf perempuan dan laki-laki
- Melibatkan feminis/aktifis perempuan dalam monitoring dan evaluasi
- Menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai penerima manfaa

G. Penutup

Kesangsian gerakan feminis terhadap komitmen laki-laki akan keadilan gender dan anti kekerasan terhadap perempuan serta ketidakbulatan penerimaan feminis akan kehadiran laki-laki dalam gerakan perempuan sangat beralasan karena gerakan feminis dan gerakan perempuan (khususnya di Indonesia) beberapa kali harus menerima kenyataan dikhianati dan dikecewakan oleh laki-laki yang mengaku pro-feminis yang pada akhirnya melanggar komitmennya dengan menciderai prinsip feminisme dan bahkan menjadi pelaku kekerasan.

Akuntabilitas gerakan laki-laki pro-feminis dan program pelibatan laki-laki untuk pencapaian keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap gerakan perempuan sejatinya adalah bagian integral dari komitmen laki-laki terhadap nilai-nilai feminisme dan anti kekerasan dan bukan muncul karena ada riwayat pengkhianatan laki-laki terhadap gerakan perempuan.

Akuntabilitas gerakan laki-laki pro-feminis adalah mekanisme bagi laki-laki untuk menjaga komitmennya sendiri dan secara bersamaan bukti-bukti akuntabilitas gerakan laki-laki pro-feminis dan program pelibatan laki-laki untuk keadilan gender akan menjadi alasan bagi gerakan feminis dan gerakan perempuan untuk percaya (*trust*) kepada laki-laki yang bersepakat dengan nilai-nilai feminisme dan anti kekerasan terhadap perempuan.

Referensi

Kilmartin, C., Allison, J., 2007, *Men's Violence against Women: Theory, Research and Activism*, Lawrence Erlbaum Associates Inc. New Jersey.

Hasyim, N., 2014, *How Far Can Men Go? A Study of Men's Movement to End Violence Against Women in Indonesia*, University of Wollongong, Wollongong

Bojin, K. 2013, 'Feminist Solidarity: No Boys Allowed? Views of Pro-feminist Men on Collaboration and Alliance-building with Women's Movements.' *Gender and Development*, vol. 21, no. 2, pp. 363–379

Funk, R.E. 1993, *Stopping Rape: A Challenge for Men*, New Society Publishers, Philadelphia.